

Siaran Pers

Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Bappenas Bahas Hasil Penilaian Kalimantan Timur Sebagai Calon Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN – Kementerian PPN/Bappenas menggelar **Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia** yang mengangkat tema **“Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”** di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (21/8). Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Timur menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya. Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam *talkshow* adalah: Dosen Universitas Mulawarman Rustam Fahmy, Dosen Universitas Mulawarman Martinus Nanang, Dosen Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi, dan moderator Zairin Zain.

“Kajian sudah kita lakukan sejak 2017, bahkan Presiden RI sudah menginisiasi sejak 2016 dan menugaskan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian. Hampir semua kementerian/lembaga kita libatkan, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian KLHK, karna tanahnya kalau tidak terkait dengan tambang pasti terkait dengan hutan. Dari hasil kajian tersebut, kami melihat dampak positif terbesar ada di Kalimantan,” ujar Deputi Rudy. Selain itu, kajian Kementerian PPN/Bappenas menyebut jika IKN dipindah ke luar Jawa, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan. Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan *price of capital* ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan *price of labour* 1,37 persen.

Kriteria penentuan lokasi yang digunakan adalah: 1) lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia; 2) tersedia lahan luas milik pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi; 3) lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut; 4) Tersedia sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan; 5) dekat dengan kota *existing* yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi a) akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan; b) ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan c) tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan; 6) potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang; 7) memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut, Deputi Rudy menjelaskan hasil penilaian calon lokasi IKN di Provinsi Kalimantan Timur. “Luas deliniasi kawasan sebesar 180.965 hektar dan yang potensial 85.885,83 hektar. Kuantitas air permukaan diperoleh melalui tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sanggai/Sepaku, Samboja, dan Dondang. Daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah. Wilayah deliniasi tidak memiliki historis kebakaran hutan. Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, tetapi hanya beberapa *hotspot* saja yang menjadi pemicu kebakaran utama. Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta di bagian Tahura. Dekat dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda dan dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda, didukung oleh Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggang sekitar 45 km dan Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto sekitar 76 km

dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau. Kalimantan Timur ini 30 persen didominasi etnis Jawa, 21 persen Bugis, dan 12 persen Banjar. Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur juga memiliki akses darat, laut, dan udara,” jelas Deputy Rudy.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut Kalimantan Timur mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. “Menurut saya, Kalimantan Timur adalah daerah yang tepat sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Tetapi, di mana pun lokasi ibu kota yang terpilih nantinya, Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung keputusan pemerintah. Penerimaan rakyat Kalimantan Timur sangat terbuka terhadap pendatang, tidak ada resistensi atas budaya luar dan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota, terbukti selama ini Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah terjadi konflik,” jelas beliau. Senada dengan Isran, Dosen Universitas Mulawarman Rustam Fahmy, Aji Sofyan Effendi, dan Martinus Nanang sepakat menyebut Kalimantan Timur adalah provinsi yang tepat karena memiliki komitmen dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, mampu menjadi representasi kolektif masyarakat Indonesia karena keragaman budaya, serta memiliki potensi peningkatan ekonomi bagi daerah *hinterland* dan pemasok kebutuhan kota.

Deputy Rudy menambahkan, kajian Kementerian PPN/Bappenas akan mengulas lebih dalam tentang daerah IKN terpilih setelah Presiden RI menetapkan lokasi IKN tersebut. “Kalau sudah ditetapkan Presiden, Bappenas akan buat kajian untuk mendalami lebih lanjut dan akan siapkan masterplan, juga urban desainnya. Dalam masterplan tersebut, semua infrastruktur, termasuk telepon, listrik, dan lain-lain, akan disiapkan di bawah tanah. Sistem transportasi akan terkoneksi dengan rencana detail tata ruang yang lebih baik untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Skema pendanaan finansial juga akan kita dalami, dengan sama sekali tidak memperhitungkan utang dan meminimalkan alokasi APBN,” tutupnya.

Balikpapan, 21 Agustus 2019

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31934283; Faks.: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id